



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 merupakan laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka tahun 2023 dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan urusan kewenangannya, yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. LKIP ini menjadi referensi/acuan dan evaluasi bagi dinas untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja.

Kami menyadari Laporan ini masih belum sempurna, masukan dan saran dari semua pihak sangat kami butuhkan untuk memperbaiki dan menyempurnakannya, serta kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu proses penyelesaian LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

Demikian, LKIP ini dibuat dan untuk dapat digunakan sebagai bahan laporan/referensi-referensi lainnya dalam melaksanakan kegiatan lebih terarah, efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Majalegka, Februari 2024



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Majalengka

Dr. Drs. H. NASRUDIN, M. M.Pd

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19680204 199903 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambar Umum.....	1
1.2. Data Kepegawaian.....	3
1.3. Issue Strategis	7
1.4. Sistematika Pelaporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	10
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Pengukuran Kinerja	14
3.2. Analisis Capaian Kinerja	16
Indikator Kinerja IPG	16
Indikator Kinerja KLA	22
Indikator Kinerja TFR	28
3.3. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV KESIMPULAN	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

P E N D A H U L U A N

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga

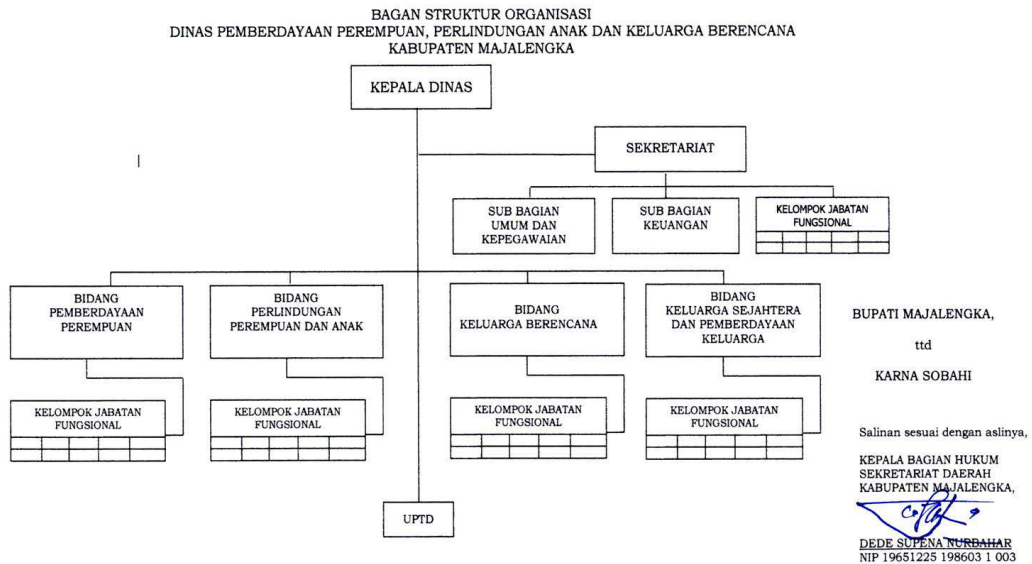
berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi kelompok jabatan fungsional
- d. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi kelompok jabatan fungsional
- e. Kepala Bidang Keluarga Berencana, membawahi kelompok jabatan fungsional
- f. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi kelompok jabatan fungsional:

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka sebagaimana pada Gambar 1 berikut :

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 69 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA



Gambar 1. Struktur Organisasi DP3AKB Kab. Majalengka

1.2. Data Kepegawaian

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana memiliki sumberdaya manusia yang potensial dengan jumlah 23 orang ASN orang dengan rincian sebagai berikut :

- **Data Kepegawaian**

Tabel 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

No.	Klasifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Ket
1	Kepala Dinas	1 orang	PNS
2	Sekretaris	1 orang	PNS
3	Kepala Bidang	4 orang	PNS
4	Kepala Sub Bagian	2 orang	PNS
	Jabatan Fungsional Perencana	1 orang	PNS
5	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	4 orang	PNS

	Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	4 orang	PNS
7	Fungsional Umum	6 orang	PNS
JUMLAH		23 orang	

Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

KLASIFIKASI PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH PEGAWAI
GOLONGAN IV			7
Pembina Utama	IV	E	-
Pembina Utama Madya	IV	D	-
Pembina Utama Muda	IV	C	1 orang
Pembina Tingkat I	IV	B	-
Pembina	IV	A	6 orang
GOLONGAN III			15
Penata Tingkat I	III	D	7 orang
Penata	III	C	2 orang
Penata Muda Tingkat I	III	B	3 orang
Penata Muda	III	A	3 orang
GOLONGAN II			3
Pengatur Tingkat I	II	D	-
Pengatur	II	C	1 orang
Pengatur Muda Tingkat I	II	B	
Pengatur Muda	II	A	-

Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	KLASIFIKASI JENIS KELAMIN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Laki-laki	9 orang	
2	Perempuan	14 orang	
	JUMLAH	23 orang	

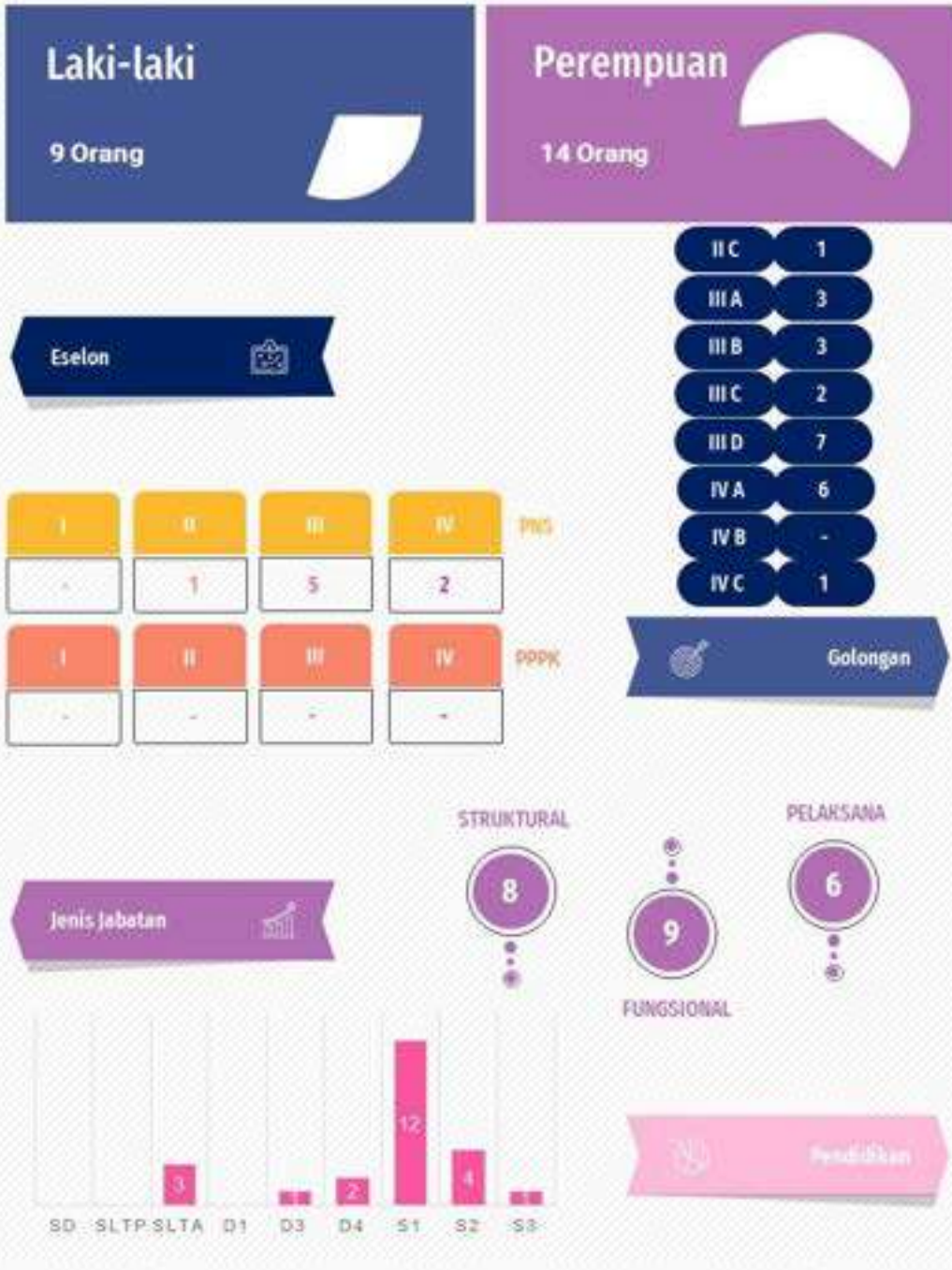
Tabel 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Eselon

NO.	KLASIFIKASI ESELON	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	I.a	-	
2	I.b	-	
3	II.a	-	
4	II.b	1 Orang	
5	III.a	1 Orang	
6	III.b	4 Orang	
7	IV.a	2 Orang	
JUMLAH		8 Orang	

Tabel 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO.	Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Sekolah Dasar	-	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	3 Orang	
4	Diploma III	1 Orang	
5	Diploma IV	2 Orang	
6	Strata I	12 Orang	
7	Strata 2	4 Orang	
8	Strata 3	1 Orang	
JUMLAH		23 Orang	

INFOGRAFIK ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



1.3. Issue Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta telaahan visi, misi dan program kerja Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta telaahan Rencana Strategis baik pemerintahan provinsi dan Kementerian lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka menetapkan Issue Strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, serta tindak pidana perdagangan orang.
3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
4. Masih terjadinya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran.
5. Kurangnya ketersediaan data gender dan anak.
6. Belum dimilikinya pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang sesuai dengan standar.
7. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk.
8. Tingginya Unmetneed KB.
9. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal Perangkat Daerah.

11. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran untuk mencapai target kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas capaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja, Cascading, Bukti sebar LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, pencapaian/prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, SK Tim Penyusunan LKIP.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka Nomor 345 Tahun 2022.

Perubahan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

TUJUAN (2018-2023)	TUJUAN (Hasil Reviu : 2021-2023)
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Penurunan Tingkat Kemiskinan
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan.	
3. Meningkatkan pemenuhan hak hak anak	
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan perempuan dan anak	
5. Mengendalikan kelahiran	
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga	
7. Meningkatkan kapasitas perangkat daerah.	

Perubahan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sasaran (2018-2023)	Sasaran (Hasil Reviu : 2021-2023)
1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1. Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan 2. Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak 3. Terkendalinya Penduduk
2. Meningkatnya kesejahteraan perempuan kepala keluarga miskin.	
3. Meningkatnya implementasi pemenuhan hak hak anak	
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perlindungan terhadap perempuan	

<p>Meningkatnya kualitas dan kuantitas perlindungan terhadap anak</p> <p>5. mengendalikan jumlah anak dalam satu keluarga.</p> <p>6. Meningkatnya kesejahteraan keluarga</p> <p>Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan</p> <p>7. meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja perangkat daerah.</p>	
--	--

Perubahan Indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Indikator (2018-2023)	Indikator (Hasil Reviu : 2021-2023)
1. Indek Pembangunan Perempuan (IPG)	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Jumlah perempuan kepala keluarga yang miskin menjadi mandiri	2. Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak
3. Kategori capaian Kabupaten Layak Anak	3. Total Fertility Ratio
4. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	
Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	
5. Menurunnya angka fertilitas Total	
6. Menurunnya tingkat perceraian	
7. Rata-rata usia kawin pertama	
8. Tindaklanjut inspektotar/BPK	

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mengukur kinerja dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, IKU merupakan hal yang pertama kali harus ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai kinerja utama yang terdapat dalam tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja seperti yang tercantum dalam tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan		
					2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	-	85,76	86,01	86,57	86,98	86,24	86,24	86,60
		Terlindungi dan Terpenuhi Hak Anak	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Pratama	Pratama	Pratama (500,06)
		Terkendalinya Penduduk	Total Fertility Ratio	Point	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,17	2,16	2,17

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka Tahun 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,60
2	Terlindungi dan Terpenuhi Hak Anak	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Pratama (500,06)
3	Terkendalinya Penduduk	Total Fertility Ratio	2,17

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka ditetapkan rencana anggaran sebagai berikut

PROGRAM	Rencana Anggaran	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.149.659.920	16,44
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	280.923.700	1,11
Program Perlindungan Perempuan	75.000.000	0,30
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	721.112.300	2,86
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	50.000.000	0,20
Program Perlindungan Khusus Anak	75.000.000	0,30
Program Pengendalian Penduduk	542.400.000	2,15
Program Pembinaan Keluarga Berencana	12.636.115.000	50,05
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	6.717.000.000	26,60
Jumlah	25.247.210.920	100,00

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

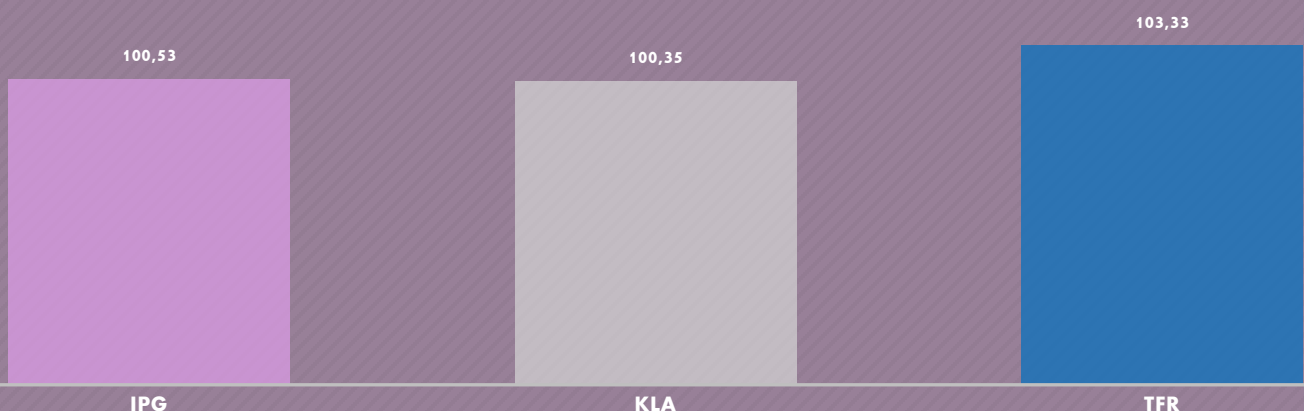
Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA), Total Fertility Rate (TFR) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 101,40 %. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Capaian IKU



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka terkait capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) sasaran meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan, nilai capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) sasaran terlindungi dan terpenuhinya hak anak, Total Fertility Rate (TFR) sasaran terkendalinya penduduk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis sampai saat laporan ini dibuat belum dapat diketahui, karena data-data dimaksud belum rilis dan atau masih dalam proses penghitungan/penyusunan. Data Indikator Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) bersumber dari Data BPS, Indikator Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) bersumber dari evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) dan masih sedang berlangsung proses evaluasi, serta indikator Kinerja Total Fertility Ratio (TFR) bersumber dari BKKBN.

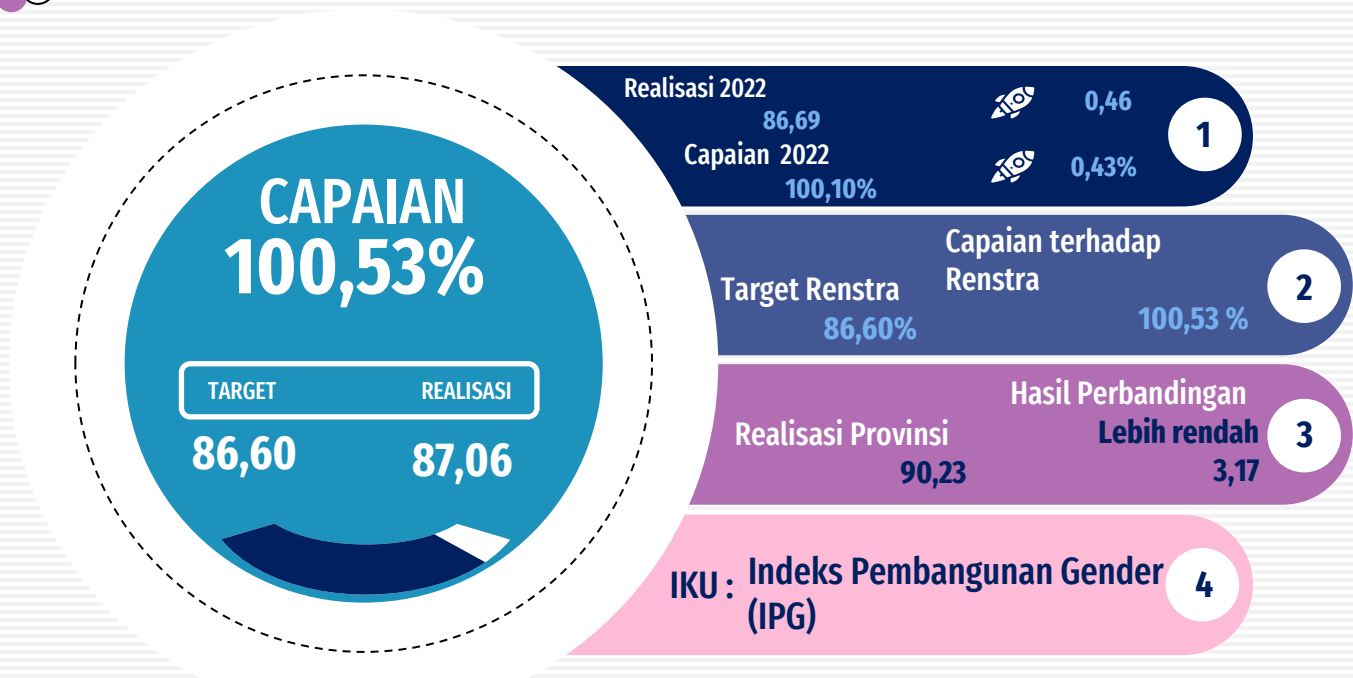
3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	86,60	87,06	100,5 3 %
2	Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak	Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Pratama (500,06)	Data Realisasi Belum Rilis (masih Proses Evaluasi)	Data Realisasi Belum Rilis (masih Proses Evaluasi)

				Sumber data : Kemen PPA	Sumber data : Kemen PPA
3	Terkendalinya Penduduk	Total Fertility Ratio	2,17	2,10	103,33 %



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)



FAKTOR

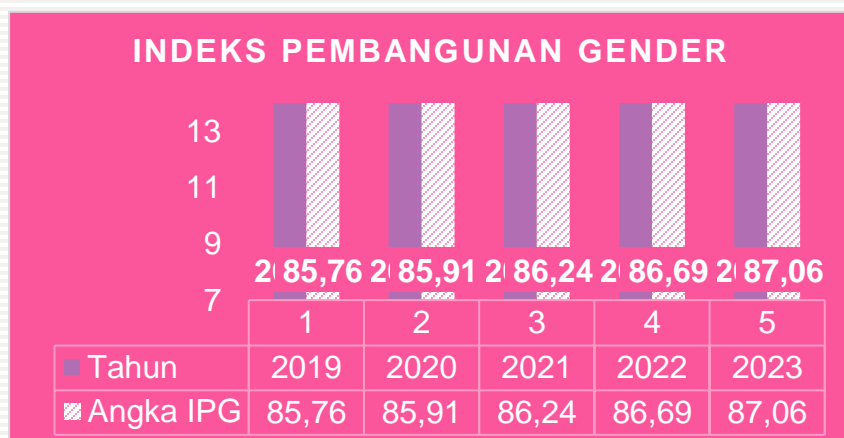
- ❑ Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan kaum Perempuan, sehingga menjadi lebih produktif
- ❑ Meningkatnya Koordinasi dan Kolaborasi stakeholder dalam pembangunan gender
- ❑ Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Manusia

PROGRAM

- ❑ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- ❑ Program Peningkatan Kualitas Keluarga

EFISIENSI

Sumberdaya dalam pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) terdapat efisiensi 0,45 %



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Indikator I

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	86,60	87,06	100,53 %

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persolan gender yang diperoleh melalui perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara Perempuan dan laki-laki.

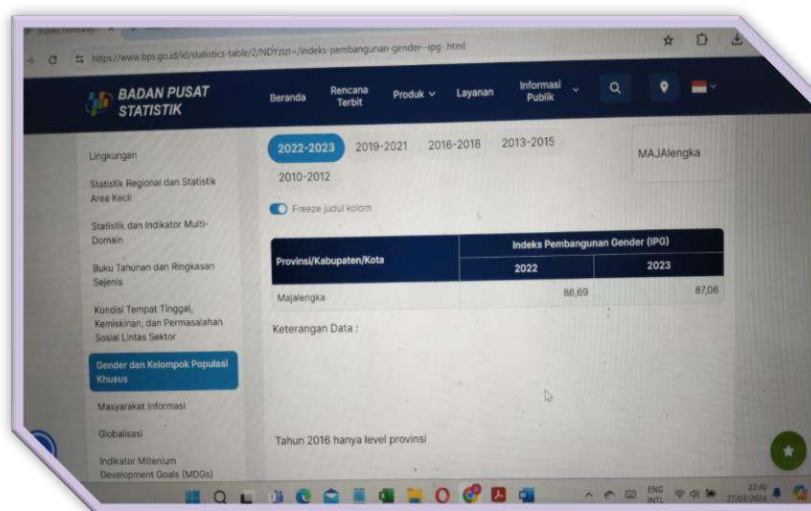
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 sesuai data yang dirilis BPS mencapai 87,06 hal ini menunjukkan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih tinggi 0,46 point dari target yang ditetapkan sebesar 86,60.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	87,06	86,69	+ 0,46

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	100,53	100,10	+ 0, 43

Capaian Indikator IPG Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,43 point dibandingkan tahun 2022 dimana pada tahun 2023 capaian IPG sebesar 100,53 % sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 100,10 %.



IPG Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dan 2023

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	87,06	86,60	+ 0,46

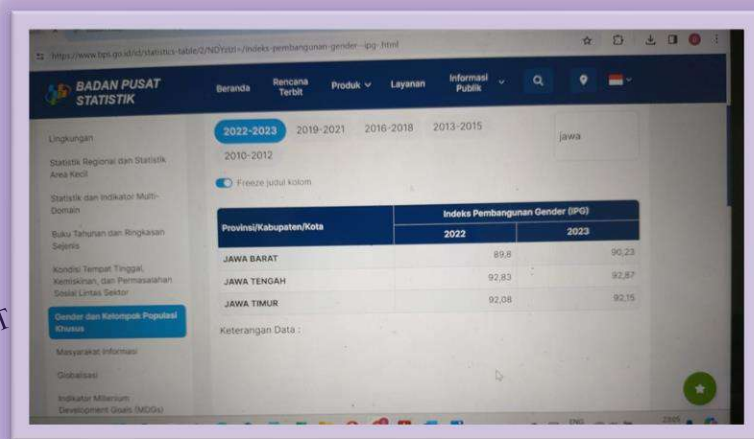
Perbandingan realiasi IPG Kabupaten Majalengka tahun 2023 dengan melebihi Target akhir Renstra sebesar 0,46 point.

4. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	87,06	90,23	Lebih kecil/lebih rendah 3,17 point

Realisasi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Majalengka dengan pada tahun 2023 masih lebih kecil/lebih rendah 3,17 point bila dibandingkan dengan realisasi IPG Tingkat Provinsi Jawa Barat.

IPG
PROVINSI
JAWA BARAT



5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender ini adalah antara lain semakin meningkatnya peran masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pembangunan baik sebagai subjek maupun objek pembangunan, meningkatnya keterampilan dan keahlian dan keberdayaan kaum perempuan sehingga berdayaguna, meningkatnya peran Pokja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) hingga lebih terjalin koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan pembangunan gender di Kabupaten Majalengka, meningkatnya peran dan perhatian pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan gender.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait dengan pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender antara lain :

- **Meningkatkan keberdayaan Masyarakat, khususnya perempuan** dalam meningkatkan kemauan dan kemampuannya untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan.



Pelatihan Keterampilan Pembuatan Bucket pada Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita



- **Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder**, melalui pertemuan dan rapat koordinasi antar perangkat daerah lembaga/dunia usaha lainnya untuk melaksanakan pembangunan responsive gender.



Bimtek PPRG, meliputi GAP dan GBS

- **Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia**, melalui Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk memahami dan menguasai GAP (Gender Analisis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statetment)



Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi dan capaian indikator ini yaitu melanjutkan dan meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan pembangunan gender.

6. Program yang Mendukung Keberhasilan

Beberapa program yang mendukung keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka tahun 2023 adalah :

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan	280.923.700
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Bidang Pemberdayaan Perempuan	721.112.300
Jumlah			1.002.036.000

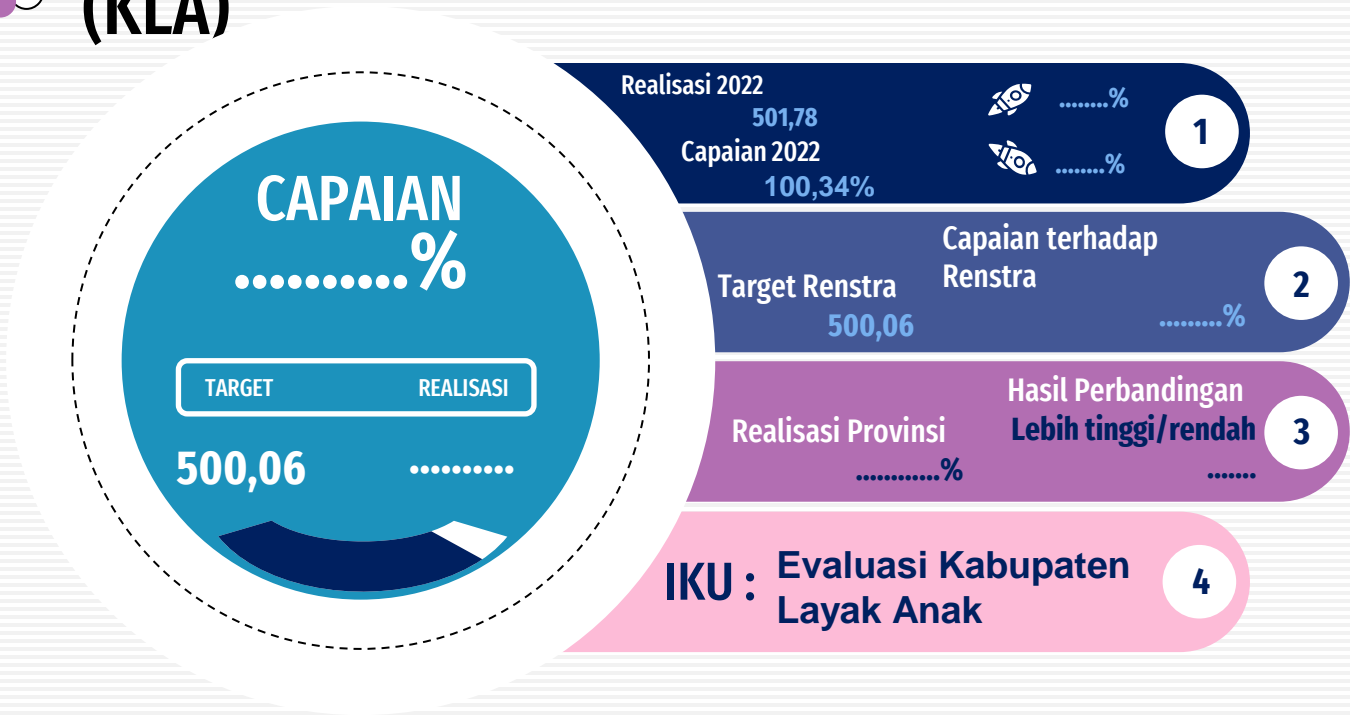
7. Efisiensi Sumberdaya

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diintervensi oleh 2 (dua) program, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, melalui Sub Kegiatan Koordinasi

Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 280.923.700 dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga, melalui Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga melalui Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 721.112.300, sehingga total pagu anggaran sebesar Rp 1.002.036.000, sedangkan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 997.481.930, dengan demikian terdapat **efisiensi** sebesar Rp 4.554.070 atau 0,45 %.



CAPAIAN EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)



FAKTOR

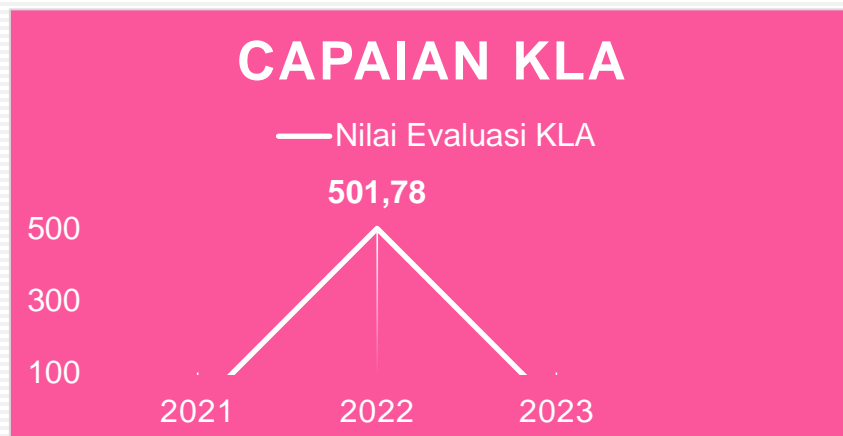
- Peran Masyarakat, Lembaga Pemerintah, dan Dunia Usaha
- Kualitas pelayanan penanganan korban
- Meningkatnya Koordinasi dan Kolaborasi antar stakeholder
- Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Manusia

- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Perlindungan Khusus Anak

PROGRAM

EFISIENSI

Belum dapat diukur



Indikator II
Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terlindungi dan Terpenuhi Hak Anak	Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Pratama (500,06)	Data Realisasi Belum Rilis Sumber data : Kemen PPA (masih proses evaluasi)	Belum dapat diukur

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Capaian/Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 belum rilis (masih dalam proses evaluasi) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA).

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Peningkatan/ Penurunan
Terlindungi dan Terpenuhi Hak Anak	Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Data Realisasi Belum Rilis Sumber data : Kemen PPA (masih proses evaluasi)	Pratama (501,78)	Belum dapat diukur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2022	Peningkatan/ Penurunan
Terlindungi dan Terpenuhi Hak Anak	Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Data Realisasi Belum Rilis Sumber data : Kemen PPA (masih proses evaluasi)	100,34	Belum dapat diukur

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan 2022 belum dapat diukur karena data tahun 2023 belum ada dan masih dalam proses evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Terlindungi dan Terpenuhi Hak Anak	Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Data Realisasi Belum Rilis Sumber data : Kemen PPA (masih proses evaluasi)	Pratama (500,06)	Belum dapat diukur

Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan Target akhir Renstra, capaian evaluasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Majalengka belum dapat diukur karena data belum ada dan masih proses evaluasi KLA.

4. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi	Peningkatan/ Penurunan
Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak	Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Data Realisasi Belum Rilis Sumber data : Kemen PPA (masih proses evaluasi)	Data Realisasi Belum Rilis Sumber data : Kemen PPA (masih proses evaluasi)	Belum dapat diukur

Perbandingan capaian evaluasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Majalengka dengan provinsi tahun 2023 belum dapat diukur karena masih dalam proses pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak ini adalah antara lain semakin meningkatnya peran Masyarakat, lembaga dan dunia usaha, hingga lebih terjalin koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Majalengka, meningkatnya peran dan perhatian pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait dengan pencapaian indikator evaluasi capaian Kabupaten Layak Anak antara lain :

- **Meningkatkan peran masyarakat, lembaga, dan dunia usaha** dalam meningkatkan upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui pembinaan, sosialisasi, advokasi, pendampingan.



Sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat



Pembinaan Satgas PKDRT

- **Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan korban kekerasan** melalui pendampingan korban kekerasan



- **Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder**, melalui pertemuan dan rapat koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan capaian Kabupaten Layak Anak.



Koordinasi dan Kolaborasi dengan Stakeholder terkait

- **Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia**, melalui bimbingan teknis/pembinaan satuan Pendidikan ramah anak, puskesmas ramah anak dan lainnya.



Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi dan capaian indikator ini yaitu melanjutkan dan meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan capaian kabupaten layak anak.

6. Program yang Mendukung Kinerja

Beberapa program yang mendukung pencapaian target kinerja capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka tahun 2023 adalah :

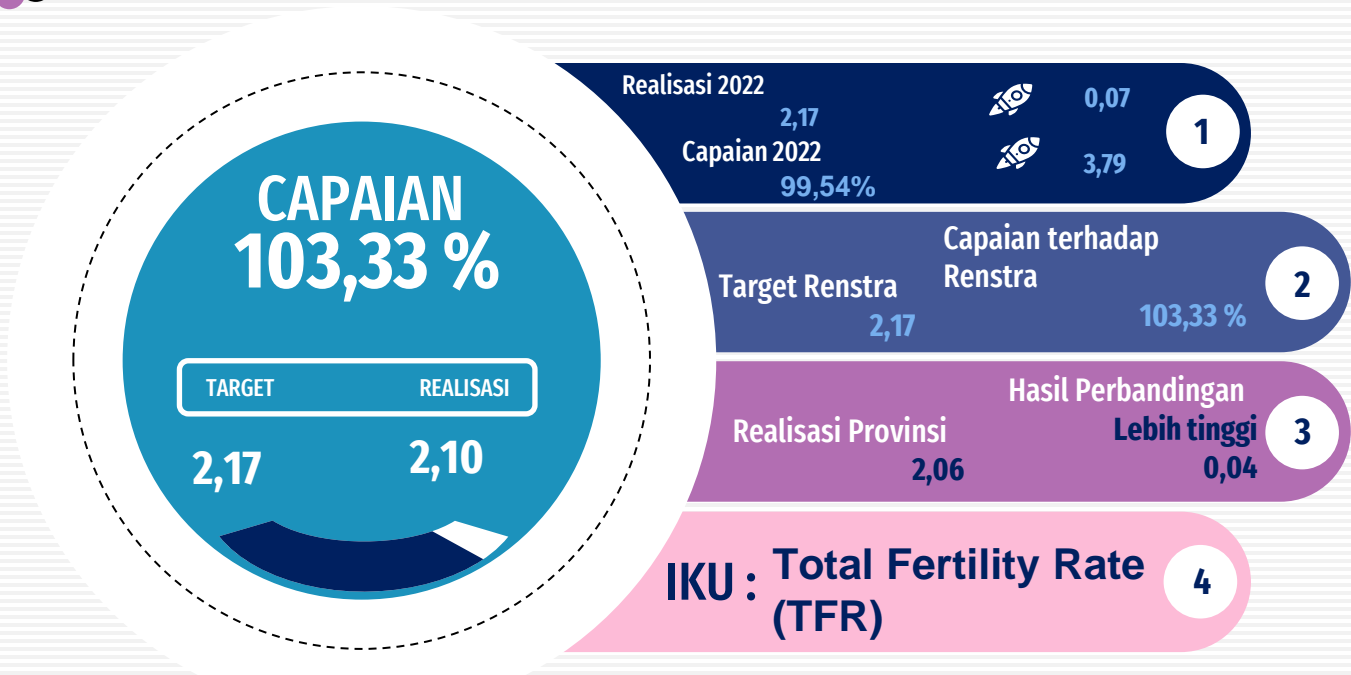
No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	50.000.000
2	Program Perlindungan Khusus Anak	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	75.000.000
3.	Program Perlindungan Perempuan	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	75.000.000
Jumlah			200.000.000

7. Efisiensi Sumberdaya

Untuk mencapai target indikator kinerja evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Majalengka oleh 3 (tiga) program, yaitu Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000, Program Perlindungan Khusus Anak melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 75.000.000 serta Program Perlindungan Perempuan melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000 dan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 25.000.000, sehingga total pagu anggaran sebesar Rp 200.000.000, sedangkan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 198.390.000, dengan demikian terdapat **efisiensi** sebesar Rp 1.070.000 atau 0,53%.



TOTAL FERTILITY RATE (TFR)



FAKTOR

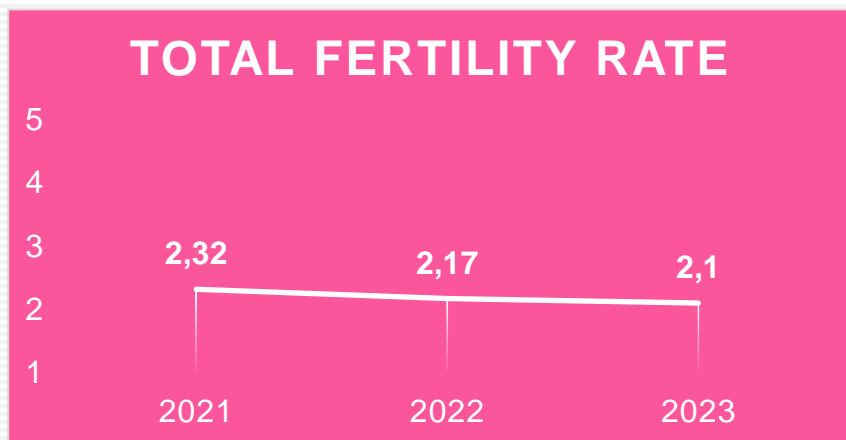
- ❑ Meningkatnya peran Masyarakat, Koordinasi dan kolaborasi lembaga terkait
- ❑ Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kontrasepsi di fasilitas-fasilitas Kesehatan
- ❑ Sarana dan prasarana pelayanan KB
- ❑ Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia

- ❑ Program Pengendalian Penduduk
- ❑ Program Pembinaan Keluarga Berencana
- ❑ Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

PROGRAM

EFISIENSI

Sumberdaya dalam pencapaian Indikator Kinerja Total Fertility Rate (TFR) terdapat efisiensi sebesar 0,72%



Indikator III Terkendalnya Penduduk (TFR)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terkendalnya Penduduk	Total Fertility Ratio	2,17	2,10	103,33 %

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang Perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila Perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.

Capaian Indikator terkendalnya penduduk dengan indikator Total Fertility Rati (TFR) Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 mencapai 103,33 % sesuai data yang dirilis BKKBN Republik Indonesia.

No	Kab/Kota	TFR	ASR								Catatan
			25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
140	BAKTI	1,95	6,1	17,1	186,1	103,9	55,9	18,5	1,6		
141	BARONG	1,82	27,6	89,1	112,7	99,1	54,7	13,1	2,9		
142	BERSEMBER	1,15	26,1	107,1	134,1	109,1	83,9	22,9	4,9		
143	BONG	1,58	18,5	95,7	117,9	51,9	25,8	18,2	2,9		
144	BUNDA	1,01	21,4	96,8	115,4	91,1	57,8	25,9	2,2		
145	DESER	2,28	28,4	226,7	178,1	105,9	88,2	14,9	1,9		
146	MANDUNG	2,07	22,7	201,1	123,9	91,1	54,2	15,1	1,6		
147	MANDUNG BARAT	2,12	26,7	201,9	125,9	91,8	53,9	13,9	1,9		
148	MEDANG	1,69	30,6	100,2	111,1	31,1	46,9	17,9	2,2		
149	MULU	1,87	12,5	117,9	129,9	109,1	67,8	21,8	3,9		
150	NGAMALANG	1,25	30,1	103,1	123,9	91,2	53,8	18,8	2,9		
151	PANGL	2,29	19,2	100,4	135,7	96,1	99,7	18,9	1,3	Persempitan	
152	PERANG	2,11	21,2	96,9	124,9	102,2	69,1	18,1	2,5		
153	PINDANG	2,14	14,1	81,1	118,9	101,6	57,8	17,7	2,9		
154	ROKONG	1,06	26,7	87,9	111,1	90,9	69,7	24,9	1,5		
155	MAJALENGA	1,10	19,2	100,4	112,8	95,8	59,7	18,9	2,4		
156	TURANG	1,28	35,7	101,1	112,8	94,2	53,8	17,2	2,9		
157	KOTA BAWANG	1,79	17,7	76,1	113,9	88,1	50,7	15,9	2,9		
158	KOTA GRISON	1,02	19,2	86,1	100,7	87,1	55,8	14,9	1,5		
159	KOTA BOGOR	1,84	9,8	89,6	111,2	91,8	56,1	16,7	1,6		
160	KOTA SUKAM	2,17	14,6	91,6	134,8	100,9	61,9	13,1	2,2		
161	KOTA BERANG	1,89	7,7	64,7	126,4	101,4	61,2	14,6	1,5		
162	KOTA SEPUR	1,99	7	93,7	139,5	101,8	66,9	16,1	1,8		
163	KOTA ZARAH	2,01	11,1	83,9	133,7	100,9	57,1	16,6	1,8		
164	KOTA TEGAWALITA	1,13	14,1	87,9	111,1	99,8	60,4	14,1	2,2		
165	KOTA BAKEL	1,75	19,6	99,9	111,1	101,7	64,7	17,1	2,1	Persempitan	
166	KOTA BAKEL	2,15	17,8	107,1	121,1	91,8	61,8	16,1	1,1	Persempitan	
167	KECAMATAN BAKEL BARAT	2,08	21,4	89	122,8	91,5	60,8	14,4	1,8		

Total Fertility Rate Kabupaten Majalengka Tahun 2023

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Penurunan/ Peningkatan/
Terkendalinya Penduduk	Total Fertility Ratio	2,10	2,17	- 0,07

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2022	Peningkatan/ Penurunan
Terkendalinya Penduduk	Total Fertility Ratio	103,33	99,54	3,79 %

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator TFR tahun 2023 dengan 2022 belum dapat diukur karena data tahun 2023 dapat diuraikan bahwa realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan (penurunan bermakna keberhasilan) sebesar 0,07 poin, Dimana pada tahun 2022 realisasi TFR sebesar 2,17 sedangkan tahun 2023 mencapai 2,10, dengan demikian capaian kinerja indikator TFR tahun 2023 mengalami peningkatan 3,79 persen bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, Dimana capaian tahun 2023 sebesar 103,33 % sedangkan pada tahun 2022 mencapai 99,54 %.

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Terkendalinya Penduduk	Total Fertility Ratio	2,10	2,17	0,07

Jika dibandingkan realiasi tahun 2023 dengan Target akhir Renstra, capaian indikator total fertility rate Kabupaten Majalengka mencapai 103,33 %, dimana target akhir Renstra 2,17.

4. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Rata-rata Standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi	Peningkatan/ Penurunan
Terkendalinya Penduduk	Total Fertility Ratio	2,10	2,06	Lebih tinggi 0,04

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Indikator TFR Kabupaten Majalengka masih lebih tinggi 0,04 dibanding dengan realisasi Provinsi Belum dapat diukur karena data belum ada/belum rilis.

5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan antara lain pemakaian kontrasepsi yang drop out, tingginya/rendahnya calon akseptor yang tidak dapat terpenuhi kesertaan ber-KB nya, peran Masyarakat, lembaga dan dunia usaha, koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait dengan pencapaian indikator evaluasi capaian pengendalian penduduk antara lain :

- **Meningkatkan peran masyarakat, lembaga, stakeholder terkait serta Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder** dalam meningkatkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui pembinaan, advokasi dan KIE, serta melalui pertemuan dan rapat koordinasi antar perangkat daerah lembaga lainnya dan kegiatan/aktivitas lainnya untuk melaksanakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana salah satunya melalui kegiatan kesrak PKK.



Kegiatan Kesrak PKK KB Kes



Integrasi Lintas Sektor

- **Meningkatkan pelayanan kontrasepsi keluarga berencana di fasilitas-fasilitas Kesehatan**, melalui pelayanan-pelayanan di fasilitas kesehatan dan pelayanan kontrasepsi pada momen-momen tertentu.



Pelayanan Kontrasepsi KB MOW dan MOP

- **Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB** melalui penyediaan sarana pelayanan KB berupa kendaraan R2 jemput antar akseptor.



- **Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia,** melalui pembinaan, advokasi dan KIE terhadap petugas lapangan.



Pembinaan Kampung KB



Pembinaan IMP

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan realisasi dan capaian indikator ini yaitu melanjutkan dan meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

6. Program yang Mendukung Kinerja

Beberapa program yang mendukung pencapaian target kinerja Total Fertility Ratio (TFR) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka tahun 2023 adalah :

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Pengendalian Penduduk	Bidang Keluarga Berencana	542.400.000
2	Pembinaan Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana	12.636.115.000
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Bidang KSP	6.717.000.000
Jumlah			19.895.515.000

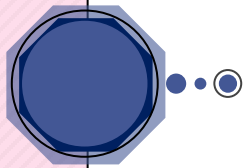
7. Efisiensi Sumberdaya

Pencapaian Target Total Fertility Ratio (TFR) tahun 2023 diintervensi oleh 3 (tiga) program dengan pagu anggaran Rp 19.895.515.000 dan realisasi anggaran Rp. 19.752.609.970, terdapat efisiensi sebesar Rp 142.905.030 atau sebesar 0,72%

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengampu 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA), dan Total Fertility Ratio (TFR). Ketiga indikator kinerja tersebut dalam pencapaiannya diintervensi melalui program-program dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.097.551.000 dan realisasi serapan sebesar Rp20.948.481.900 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	100,53	99,55
2	Terlindungi dan Terpenuhi Hak Anak	Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Data Belum Rilis	99,19
3	Terkendalinya Penduduk	Total Fertility Rate	103,33	99,29



BAB 4

KESIMPULAN

BAB IV KESIMPULAN

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 yang mengampu 3 (tiga) indikator kinerja sampai saat ini masih belum dapat diukur karena data masih belum ada/belum rilis.

Secara umum dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melaksanakan langkah-langkah upaya pencapaian antara lain melalui **Meningkatkan keberdayaan Masyarakat, khususnya perempuan** dalam meningkatkan kemauan dan kemampuannya untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan, **Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia**, melalui Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk memahami dan menguasai GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement), Pendidikan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, **Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder terkait Kabupaten Layak Anak, Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan korban kekerasan** melalui pendampingan korban kekerasan, **Meningkatkan peran masyarakat, lembaga, stakeholder terkait serta Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder** dalam meningkatkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui pembinaan, advokasi dan KIE, **Meningkatkan pelayanan kontrasepsi keluarga berencana di fasilitas-fasilitas Kesehatan, Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB, Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia**, melalui pembinaan, advokasi dan KIE terhadap petugas lapangan serta untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi dan capaian indikator dimasa yang akan datang.

Dari program-program dengan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 21.097.551.000 untuk pencapaian indikator kinerja dan realisasi sebesar Rp 20.948.481.900, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 149.069.100 atau sebesar 0,71%.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No.37 ; Telp/Fax : (0233) 8291407 Majalengka 45411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MAJALENGKA MAJALENGKA**

NOMOR 10 TAHUN 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB)
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DP3AKB KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DP3AKB.
- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

-
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024
 21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 22. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023
 23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
 24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
 25. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024
 26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
 27. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka, nomor 01 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala DP3AKB Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan personalia dan Uraian Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KE DUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - c. Menyusun materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023;

- e. Melaksanakan pendistribusian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023 kepada Kepala DP3AKB;

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Majalengka
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Dr. Drs. H. NASRUDIN, M., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19680204 199903 1 002

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DP3AKB
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 4 Januari 2024
Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DP3AKB KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN 2023.**

**I. SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DP3AKB KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023**

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
- Ketua Pelaksana : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
- Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
- Koordinator Tim Bidang Pemberdayaan Perempuan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
- Anggota :
1. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka ;
2. Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
- Koordinator Tim Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- Anggota :
1. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka ;
2. Pelaksana pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

- Koordinator Tim Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- Anggota
1. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka ;
 2. Pelaksana pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- Koordinator Tim Bidang Keluarga Berencana : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- Anggota
1. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka ;
 2. Pelaksana pada Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
- Koordinator Penyusunan Bahan/Editing/ Penyeragaman Laporan dan Kesekretariatan : Pejabat Fungsional Perencana pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- Anggota
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka ;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
 3. Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
 4. Pelaksana Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

II. URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DP3AKB KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023

1. PENANGGUNGJAWAB :

- a. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

- b. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- c. Menandatangani dan Menetapkan Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

2. KETUA PELAKSANA :

- a. Membantu Penanggungjawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- d. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang penyusun materi.
- e. Memberikan pelayanan kepada seluruh Bidang penyusun materi.
- f. Menyusun Jadwal Kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- g. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- h. Membuat laporan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan petunjuk dan arahan Penanggungjawab.

3. SEKRETARIS :

- a. Membantu Ketua pelaksanaan dalam hal pengumpulan data guna Penulisan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Membantu Ketua pelaksana dalam hal Penulisan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- c. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

4. KOORDINATOR TIM BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan materi/bahan/data bidang pemberdayaan perempuan.

5. ANGGOTA PELAKSANA TEKNIS BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN :

- a. Membantu Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

6. KOORDINATOR TIM BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

7. ANGGOTA TIM BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA:

- a. Membantu Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

8. KOORDINATOR TIM BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

9. ANGGOTA TIM BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK :

- a. Membantu Koordinator Tim Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak selama melaksanakan Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

10. KOORDINATOR TIM BIDANG KELUARGA BERENCANA :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang Keluarga Berencana.

11. ANGGOTA TIM BIDANG KELUARGA BERENCANA :

- a. Membantu Koordinator Tim Bidang Keluarga Berencana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Keluarga Berencana dalam Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

12. KOORDINATOR PENYUSUNAN BAHAN/EDITING/PENYELARASAN LAPORAN DAN KESKRETARIATAN :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang penyusunan bahan/editing/penyelarasan laporan dan kesekretariatan.

13. ANGGOTA KOORDINATOR PENYUSUNAN BAHAN/EDITING/ PENYELARASAN LAPORAN DAN KESEKRETARIATAN :

- a. Membantu Koordinator Penyusunan Bahan/Editing/penyelarasan laporan dan kesekretariatan selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Penyusunan Bahan/Editing/penyelarasan laporan dan kesekretariatan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan : di Majalengka
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Dr. Drs. H. NASRUDIN, M., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19680204 199903 1 002

POHON KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MAJALENGKA

SASARAN
KPI

PERUNDUH TINDAK REMEDIKSI	
IK	Angka Kemiskinan

SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan				Terlindungi dan Terpenuhiya Hak Anak				Terkendalinya penduduk aspek kelahiran			
	Indeks Pembangunan Gender				Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak				Total Fertility Ratio			
	TARGET	86,9			TARGET	500,06			TARGET	2,17		

SASARAN PROGRAM	Meningkatnya komitmen dan penerapan kebijakan dan PUG	Meningkatnya SDM dan Anggaran	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender Terpilah	Meningkatnya Pemanfaatan Kelengkapan dan Peran serta Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas penanggulangan Kekerasan		Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya penerapan Grand Design Kependudukan	Meningkatnya kesetaraan KB metode kontrasepsi modern		Menurunnya Pernikahan Usia Dini
	IK Persentase Kebijakan PUG yang diterapkan	IK Persentase SDM terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut hasil pembinaan	IK Persentase Buku Data Terpilah yang dimanfaatkan	IK Persentase perusahaan yang aktif dalam pembangunan gender	IK Indeks Ketahanan Keluarga	IK Persentase Penurunan kekerasan terhadap anak	IK Persentase Penurunan kekerasan terhadap Perempuan	IK Persentase Pemenuhan Cluster Hak Anak	IK Persentase Grand Design Kependudukan yang diterapkan	IK Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	IK Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	
	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET : 80,09	TARGET : 20	
	PENGAMPU : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		PENGAMPU : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		PENGAMPU : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		PENGAMPU : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		KEPALA BIDANG KEMERDEKAAN		KEPALA BIDANG KEMERDEKAAN	

SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya kualitas PUG	Meningkatnya Penerapan metode Gender Analisis Pathway	Meningkatnya Kualitas Pembinaan PUG	Meningkatnya Kualitas Data Gender Terpilah	Meningkatnya kualitas Pemanfaatan Partisipasi perusahaan dalam pembangunan gender	Meningkatnya peran perempuan kepala keluarga dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Meningkatnya peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelembehan hak anak	Meningkatnya Kualitas Grand Design Kependudukan	Meningkatnya Kesadaran masyarakat untuk menggunakan alokasi	Terkendalinya Penyalahgunaan Alat dan Obat Kontrasepsi	Meningkatnya peran serta Petugas Penyuluh KB dalam pembangunan Program Bangga Kencana	Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pelaksanaan pelayanan KB	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Perencanaan Usia Perkawinan (PUP)	
	IK Persentase kebijakan PUG yang sesuai ketentuan	IK Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan GAP dalam pembangunan gender	IK Persentase Peningkatan SDM yang terbina PUG	IK Persentase Data Gender yang akurat dan mutakhir	IK Persentase perusahaan yang telah dibina dalam pembangunan gender	IK Persentase peningkatan Perumahan Kepala keluarga yang produktif	IK Persentase Potensi Kekerasan Terhadap Anak yang terdeteksi dini	IK Persentase Pengaduan yang tertangani	IK Persentase Potensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang terdeteksi dini	IK Persentase Potensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang terdeteksi dini	IK Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pemenuhan cluster hak anak	IK Persentase Grand Design Kependudukan yang sesuai standar	IK Persentase Masyarakat yang terbina menggunakan alokasi	IK Persentase Penyalahgunaan Alat dan Obat Kontrasepsi yang terpenuhi	IK Persentase Petugas Penyuluh KB dalam melaksanakan tugas secara optimal	IK Persentase stakeholder yang aktif dalam pelaksanaan pelayanan KB	IK Persentase kebijakan PUP yang di terapkan	
	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	
	PENGAMPU : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		PENGAMPU : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		PENGAMPU : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		PENGAMPU : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		PENGAMPU : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		KEPALA BIDANG KEMERDEKAAN		KEPALA BIDANG KEMERDEKAAN		KEPALA BIDANG KEMERDEKAAN	

SASARAN SUB KEGIATAN	Tersusunnya Kajian Kebijakan tentang PUG	Terlathinya petugas tentang GAP	Terbinanya petugas tentang PUG	Tersusunnya data terpilah	Terbentuknya Pokja PUG Tim Teknis dan Vocal Point	Terselenggarakannya Bantuan Sarana Ekonomi Produktif	Tersosialisasinya kebijakan kekerasan terhadap anak	Terlayannya pengaduan kekerasan terhadap anak	Tersosialisasinya kebijakan kekerasan terhadap anak	Terlayannya pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Tersosialisasinya pemenuhan hak anak	Tersusunnya Grand Design Kependudukan	Terbinanya bantuan alokasi penggunaan alokasi	Terselenggarakannya bantuan alokasi kepada Faskes	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan serta Perubahan Perilaku KB mengenai Program Bangga Kencana	Terbinanya stakeholder tentang pelayanan KB	Tersosialisasinya kebijakan PUP kepada masyarakat	Tersedianya data dan informasi yang akurat/tepat dalam pembangunan ketahanan keluarga
	IK Jumlah Kajian Kebijakan PUG	IK Petugas yang terlatih GAP	IK Jumlah petugas yang terbina PUG	IK Jumlah Dokumen data terpilah	IK Jumlah Pokja PUG yang terbentuk	IK Jumlah Perumahan Kepala keluarga yang mendapat bantuan sarana ekonomi produktif	IK Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi	IK Jumlah Pengaduan kekerasan anak yang terlayani	IK Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi	IK Jumlah Pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	IK Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan cluster hak anak	IK Jumlah Dokumen Grand Design Kependudukan	IK Jumlah Masyarakat yang terbina tentang penggunaan alokasi	IK Jumlah faskes yg menerima bantuan alokasi	IK Jumlah Petugas Penyuluh KB yang memahami Program Bangga Kencana	IK Jumlah stakeholder yang mendapat penguatan dalam pelayanan KB	IK Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi kebijakan PUP	IK Jumlah / jenis data yang tersedia
	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	
	PENGAMPU : ANALIS KEBIAJAKAN		PENGAMPU : ANALIS KEBIAJAKAN		PENGAMPU : ANALIS KEBIAJAKAN		PENGAMPU : ANALIS KEBIAJAKAN		PENGAMPU : ANALIS KEBIAJAKAN		PENGAMPU : ANALIS KEBIAJAKAN		PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA		PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA		PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	

Tersosialisasinya kebijakan PUG	Anak Berhadapan Hukum mendapatkan pendampingan ke APH dan Psikolog	Tersedianya Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Meningkatnya peran Kampung KB dalam Program Bangga Kencana	Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam menggunakan Alat dan Obat Kontrasepsi	Terkendalinya pelaksanaan Program Bangga Kencana	Terpautnya pernikahan remaja	Tersedianya data dan informasi yang akurat/tepat dalam pembangunan ketahanan keluarga
IK Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	IK Jumlah Anak yang mendapatkan pendampingan	IK Jumlah Dokumen Data yang tersedia	IK Jumlah Kampung KB yang menguji Pembinaan	IK Jumlah Masyarakat/Aksi pter Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	IK Persentase Program kencana yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan/ petunjuk teknis	IK Persentase pernikahan remaja yg terpantau	IK Jumlah / jenis data yang tersedia
TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :
PENGAMPU : ANALIS KEBIAJAKAN	PENGAMPU : ANALIS KEBIAJAKAN	PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Tersedianya Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Meningkatnya SDM Kependudukan Berkualitas	Tersedianya sarana penunjang pelayanan kontrasepsi	Terpenuhiya sumberdaya manusia kelompok ketahanan keluarga
IK Jumlah Dokumen Data yang tersedia	IK Jumlah SDM Kependudukan yang dibina	IK Jumlah sarana pelayanan KB	IK Jumlah Pengelola Kelompok Ketahanan Keluarga yang dibina
TARGET :	TARGET :	TARGET :	TARGET :
PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Teredukasinya masyarakat tentang kesehatan reproduksi	
IK	Jumlah masyarakat yg teredukasi tentang kesehatan reproduksi
TARGET : 100000	
PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	

Tersosialisasinya Program KBPK dalam percepatan penanganan stunting kepada masyarakat dan stakeholder	
IK	Jumlah masyarakat yang mendapatkan KIE Program KBPK
TARGET : 100000	
PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	

Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi kelompok ketahanan keluarga	
IK	Jumlah sarana prasarana yang tersedia
TARGET : 100000	
PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	

Tersampainya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan Stunting melalui media luar ruang	
IK	Jumlah Materi KIE
TARGET : 100000	
Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	
ANGGARAN :	
100.000.000	
PENGAMPU : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua, 
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama

Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.
N.P. 19580204 199903 402

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,1 %
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	20 %
		Persentase anggota perempuan pada organisasi masyarakat	1,45 %
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Perempuan Kepala Keluarga Miskin	Persentase perempuan Kepala miskin yang menjadi mandiri	0,7 %
3.	Meningkatnya Implementasi Pemenuhan hak-hak anak	Tingkat capaian kabupaten layak anak	600 Nilai
4.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas perlindungan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk)	0,00015 %
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perlindungan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,0041 %
6.	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga pra sejahtera	31,11 %
7.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 %
8.	Mengendalikan jumlah anak yang dilahirkan dalam satu keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	2,26 Poin
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	79,97 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 300.000.000,00	APBD
2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp 50.000.000,00	APBD
3. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 50.000.000,00	APBD
4. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 75.000.000,00	APBD
5. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 4.644.750.000,00	APBD
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 6.717.000.000,00	APBD
7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.933.222.173,00	APBD
8. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 542.400.000,00	APBD
9. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 9.671.290.000,00	APBD
JUMLAH	Rp 26.983.662.173,00	


 Bupati Majalengka,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,


Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.
 N.P. 69680204 199003 2002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. EUIS KURNIASARI, S.ST., M.Keb.**
Jabatan : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

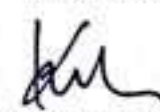
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.
NIP. 19680204 199903 1 002

Majalengka, Januari 2023
Pihak Pertama,

Hj. EUIS KURNIASARI, S.ST., M.Keb.
NIP. 19740310 199302 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

SEKRETARIS

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mewujudkan tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana	81 Poin
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	BB Nilai
3.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	B Poin
4.	Perencanaan Operasional, Mengelola dan Mengkoordinasikan, Mengendalikan, Mengevaluasi dan Melaporkan urusan DP3AKB	Persentase Perencanaan Operasional, Mengelola, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, Mengevaluasi dan Melaporkan urusan kegiatan DP3AKB	100 %

Kegiatan		Anggaran
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.497.038.173,00
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 73.000.000,00
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 278.184.000,00
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 278.184.000,00
JUMLAH		Rp 5.126.406.173,00

Majalengka, Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,



Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.
NIP. 19680204 199903 1 002

Sekretaris,



Hj. EUIS KURNIASARI, S.ST., M.Keb.
NIP. 19740310 199302 2 001



PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta pelaksanaan pada hasil kerja yang bertumbuh bagikan di bawah ini

Nama : **ENGRUS KUSWATI, S.Kep.Ners.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Sekelompok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. EUIS KURNIASARI, S.ST., M.Keb.**
Jabatan : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,

ENGRUS KUSWATI, S.Kep.Ners.
NIP. 19800517 200604 2 004

Pihak Kedua,

Hj. EUIS KURNIASARI, S.ST., M.Keb.
NIP. 19740310 199302 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mengelola Administrasi Kepegawaian	12 Bulan
		Pengelolaan surat menyurat	12 Bulan
2.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan
		Penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan
3.	Terpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan

Kegiatan		Anggaran	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	4.334.472.583,00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	120.000.000,00
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	158.184.000,00
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp	45.000.000,00
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	40.000.000,00
JUMLAH		Rp	4.697.656.583,00

Majalengka, Januari 2023

Sekretaris,

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan,



Hj. EUIS KURNIASARI, S.ST., M.Keb.
NIP. 19740310 199302 2 001



ENKUS KUSWATI, S.Kep.Ners.
NIP. 19800517 200604 2 024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ENCEP FUZIYONO**
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENKUS KUSWATI, S.Kep.Ners.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ENKUS KUSWATI, S.Kep.Ners.
NIP. 19800517 200604 2 024

ENCEP FUZIYONO
NIP. 19820107 201408 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
NO	SASARAN KEGIATAN		
1.	Mengelola, mengurus dokumen Pegawai yang ada di DP3AKB	Paket	12 Dokumen
2.	Mengurus dan Mengelola seluruh hak hak Pegawai di DP3AKB	Paket Data	12 Data

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan,



ENKUS KUSWATI, S.Kep.Ners.
NIP. 19800517 200604 2 024

Majalengka, Januari 2023

Pengadministrasi Kepegawaian,



ENCEP FUZIYONO
NIP. 19820107 201408 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. DIDIT DINURHIDAYAT**
Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. EUIS KURNIASARI, S.ST., M.Keb.**
Jabatan : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hj. EUIS KURNIASARI, S.ST., M.Keb.
NIP. 19740310 199302 2 001

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,

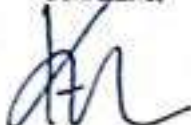
Ir. DIDIT DINURHIDAYAT
NIP. 19690617 199603 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

PERENCANAAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA	1 Dokumen
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)	1 Dokumen
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%

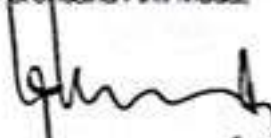
Sekretaris,



HJ. EUIS KURNIASARI, S.ST., M.Keb.
NIP. 19740310 199302 2 001

Majalengka, Januari 2023

Perencana Ahli Muda,



Ir. DIDIT DINURHIDAYAT
NIP. 19690617 199603 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UCU SUWARNI, S.IP**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. EUIS KURNIASARI, S.ST., M.Keb.**
Jabatan : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hj. EUIS KURNIASARI, S.ST., M.Keb.
NIP. 19740310 199302 2 001

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,

UCU SUWARNI, S.IP
NIP. 19691028 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Kantor	100 %

Sekretaris,



Hj. EUIS KURNIASARI, S.ST., M.Keb.
NIP. 19740310 199302 2 001

Majalengka, Januari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,



UCU SUWARNI, S.IP
NIP. 19691028 199303 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDEN DENI KURDIANA, A.Md.Kep.**
Jabatan : Pengawas Pelayanan Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebanturnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Kedua,

KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006

Pihak Pertama,

DEDEN DENI KURDIANA, A.Md.Kep.
NIP. 19840202 201903 1 005

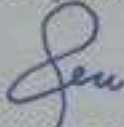
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

PENGAWAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Koordinator KB, Pos KB, Dan Sub KB	Meningkatnya Kinerja Dan Kemampuan Serta Pengetahuan Koordinator Pos KB dan Sub KB	600 Orang
2.	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana KIE	Tersedianya Sarana KIE	20 Balai Penyuluh KB

Magelang, Januari 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana,



KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006

Pengawas Pelayanan Keluarga Berencana,



DEDEN DENI KURDIANA, A.Md.Kep.
NIP. 19840202 201903 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUMU MUNAWAR**
Jabatan : Verifikator Keuangan pada Sub Bagian Umum dan Keuangan
Sekretanat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **UCU SUWARNI, S.IP**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

UCU SUWARNI, S.IP
NIP. 19691028 199303 2 004

MUMU MUNAWAR
NIP. 19670301 199103 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

VERIFIKATOR KEUANGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkelolanya uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen	12 Dokumen
2.	Tercatat dan tersusunnya penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan;	Jumlah Dokumen	12 Dokumen
3.	Terbuatnya laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban;	Jumlah Dokumen	12 Dokumen
4.	Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.	Jumlah Dokumen	12 Dokumen

Kepala Sub Bagian Keuangan,



UCU SUWARNI, S.IP
NIP. 19691028 199303 2 004

Majalengka, Januari 2023

Verifikator Keuangan,



MUMU MUNAWAR
NIP. 19670301 199103 1 009



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DUL HALIM**
Jabatan : **Pengelola Barang Milik Negara pada Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **UCU SUWARNI, S.IP**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


UCU SUWARNI, S.IP
NIP. 19691028 199303 2 004

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,


DUL HALIM
NIP. 19660516 200701 1 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya program pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekejadian dapat berjalan dengan baik;	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
2.	Terkendalinya program pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;	Jumlah Dokumen	12 Dokumen
3.	Terkoordinasinya pelaksanaan program pengelolaan Barang Milik Negara agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;	Jumlah Dokumen	12 Dokumen
4.	Terevaluasi dan tersusunnya laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;	Jumlah Dokumen	12 Dokumen
5.	Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan lancar.	Jumlah Dokumen	12 Dokumen

Kepala Sub Bagian Keuangan,


UCU SUWARNI, S.IP
NIP. 19691028 199303 2 004

Majalengka, Januari 2023
Pengelola Barang Milik Negara,


DUL HALIM
NIP. 19660516 200701 1 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRIYANI KHOFIFI, S.E., M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.
NIP. 19680204 199903 1 002

Pihak Pertama,

SRIYANI KHOFIFI, S.E., M.M.
NIP. 19830806 200604 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

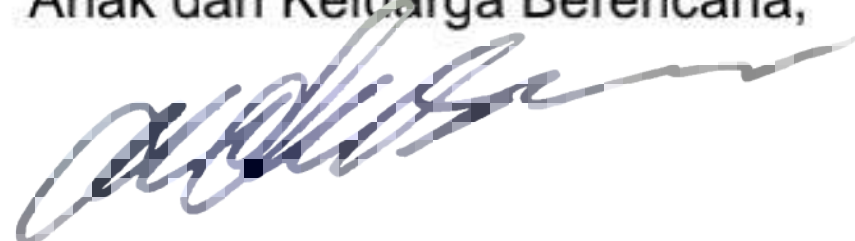
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Momentum Hari Ibu	1 Kali
		Persentase Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan	1,45 %
2.	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan pemerintahan kabupaten/kota	1 Kegiatan
3.	Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga Pemerintah pada Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya hibah terhadap ormas	1 Kelompok
		Persentase Anggota Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan	1,45 %

Kegiatan		Anggaran	
1.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	50.000.000,00
2.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	300.000.000,00
JUMLAH		Rp	350.000.000,00

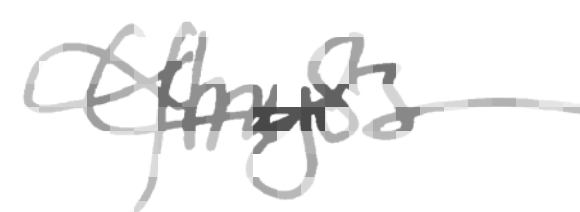
Majalengka, Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,



Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.
NIP. 19680204 199903 1 002

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan,



SRIYANI KHOFIFI, S.E., M.M.
NIP. 19830806 200604 2 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama **IVA MONASA, S.E., M.Si.**
Jabatan **Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **SRIYANI KHOFIFI, S.E., M.M.**
Jabatan **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Kedua,

SRIYANI KHOFIFI, S.E., M.M.
NIP. 19830806 200604 2 018

Pihak Pertama,

IVA MONASA, S.E., M.Si.
NIP. 19711024 199603 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kepala Keluarga Perempuan	Terlaksananya Upaya Peningkatan Aktivitas Perempuan Kepala Keluarga Miskin	100 KK

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan,



SRIYANI KHOFIFI, S.E., M.M.
NIP. 19830806 200604 2 018

Magelang, Januari 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda



IVA MONASA, S.E., M.Si.
NIP. 19711024 199603 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel : berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELIN HERLINA, S.ST.**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRIYANI KHOFIFI, S.E., M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Kedua,

SRIYANI KHOFIFI, S.E., M.M.
NIP. 19830806 200604 2 018

Pihak Pertama,

ELIN HERLINA, S.ST.
NIP. 19760624 200601 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

KEBELAKANGAN AHLI MUDA

BASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Organisasi Masyarakat	Persentase Perempuan pada Organisasi Masyarakat	10
Organisasi Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Pengarusutamaan Gender	12 Kali

Kapala Bidang Pemberdayaan Perempuan

SRIYANI KHOIFL, S.E., M.M.
NIP. 19830806 200804 2 019

Makassar, Januari 2023

Ahli Kebijakan Ahli Muda

ELIN HERLINA, S.ST
NIP. 19760824 200801 2 008



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UCU NURAIDA, S.Tr.Keb.**
Jabatan : **Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Bidang
Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRIYANI KHOFIFI, S.E., M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SRIYANI KHOFIFI, S.E., M.M.
NIP. 19830805 200604 2 018

Majalengka, Mei 2023

Pihak Pertama,

UCU NURAIDA, S.Tr.Keb.
NIP. 19770726 200801 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Kelengkapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku	Draf hasil pengumpulan bahan	1 Bahan
2.	Kesesuaian bahan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan objek kerja	Hasil analisa atau telaah	1 Agenda

Majalengka, Mei 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan:

Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak:



SRIYANI KHOFIFI, S.E., M.M.
NIP. 19830806 200604 2 018



UCU NURAIDA, S.Tr.Keb.
NIP. 19770726 200801 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. YUYUN YUHANA**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,

Dra. YUYUN YUHANA
NIP. 19670207 199203 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten	Tertindaknya Pengembangan Kabupaten Layak Anak	10 Dokumen
2.	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten	Tertindaknya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pencegahan kekerasan pada perempuan	2 Dokumen
3.	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten	Tertindaknya pelayanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten	20 Orang
4.	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten	Tertindaknya advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	20 Layanan

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	50.000.000,00
2.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	50.000.000,00
3.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	25.000.000,00
4.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.569.750.000,00
5.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	75.000.000,00
JUMLAH		Rp	4.769.750.000,00

Majalengka, Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,



Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,


Dra. YUYUN YUHANA
 NIP. 19670207 199203 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENI IRIANI, S.Sos.**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. YUYUN YUHANA**
Jabatan : **Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dra. YUYUN YUHANA
NIP. 19670207 199203 2 010



HENI IRIANI, S.Sos.
NIP. 19660615 198503 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertindakannya Pengembangan Kabupaten layak Anak	10 Dokumen
2.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	2 Dokumen

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,


Dra. YUYUN YUHANA
NIP. 19670207 199203 2 010

Majalengka, Januari 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda,


HENI IRIANI, S.Sos.
NIP. 19660615 198503 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TETI KURNIAWATI, S.Sos.**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. YUYUN YUHANA**
Jabatan : **Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dra. YUYUN YUHANA
NIP. 19670207 199203 2 010


TETI KURNIAWATI, S.Sos.
NIP. 19791123 200604 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi tingkat Daerah kabupaten	Tertindakannya Advokasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Terhadap Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	20 Layanan
2.	Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertindakannya Pelayanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten	20 Orang

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,


Dra. YUYUN YUHANA
NIP. 19670207 199203 2 010

Majalengka, Januari 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda,


TETI KURNIAWATI, S.Sos.
NIP. 19791123 200604 2 017



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EUIS SUSILAWATI, S.ST.**
Jabatan : Penyuluh Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. YUYUN YUHANA**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. YUYUN YUHANA
NIP. 19670207 199203 2 010

EUIS SUSILAWATI, S.ST.
NIP. 19741217 200701 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

PENYULUH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat Daerah Kabupaten	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	11 Bulan
		Kelengkapan bahan-bahan Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	11 Bulan
2.	Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kesesuaian bahan-bahan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	11 Bulan

Majalengka, Januari 2023

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,

Penyuluh Pemberdayaan Perempuan dan Anak,



Dra. YUYUN YUHANA
NIP. 19670207 199203 2 010



EUIS SUSILAWATI, S.ST.
NIP. 19741217 200701 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUARIAH, S.ST.**
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.
NIP. 19680204 199903 1 002

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,

JUARIAH, S.ST.
NIP. 19750204 200701 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

KEPALA BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah orang	130 Orang
2.	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Tertaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga	57 Orang
3.	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pelaksanaan momentum Hari Keluarga Nasional	1 Kegiatan
4.	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengadaan BKB KIT Stunting	37 Paket
5.	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	jumlah kelompok	361 Kelompok

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp	360.000.000,00
2.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp	6.357.000.000,00
JUMLAH		Rp	6.717.000.000,00

Majalengka, Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,

Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.
NIP. 19680204 199903 1 002

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga,

JUARIAH, S.ST.
NIP. 19750204 200701 2 008



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. DIDIH NURHIDAH**
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JUARIAH, S.ST.**
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

JUARIAH, S.ST.
NIP. 19750204 200701 2 008

Dra. DIDIH NURHIDAH
NIP. 19660426 199312 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peranserta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Operasional Ketahanan Keluarga	81 Kampung KB
2.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Operasional Pendampingan Catin, Keluarga Beresiko dan Balita Stunting	1006 Kelompok
		Pengadaan BKB Kit Stunting	20 Paket
		Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Beresiko Stunting	3018 Orang
3.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Audit Kasus Stunting	1 OPD
		Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	1 OPD
		Mini Lokakarya Kecamatan	26 Satuan Wilayah

Majalengka, Januari 2023

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga,

JUARIAH, S.ST.
NIP. 19750204 200701 2 008

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda,

Dra. DIDIH NURHIDAH
NIP. 19660426 199312 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.
NIP. 19680204 199903 1 002

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,

KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kepala Bidang Keluarga Berencana

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Mengendalikan Jumlah Anak yang dilahirkan dalam Satu Keluarga	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	79,99 %
	TFR (Total Fertility Rate)	2,32 Poin

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 1.040.300.000,00
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp 1.162.000.000,00
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.248.565.000,00
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp 2.882.425.000,00
JUMLAH	Rp 9.333.290.000,00

Majalengka, Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,

Kepala Bidang Keluarga Berencana,



[Signature]
Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.
 NIP. 19680204 199903 1 002



KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
 NIP. 19820306 200801 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASEP SAEPUDIN, S.Kep.Ners.**
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Kedua,

KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006

Pihak Pertama,

ASEP SAEPUDIN, S.Kep.Ners.
NIP. 19800923 200801 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Kinerja Balai KB	Meningkatkan Pemahaman Banggakencana	26 Balai Penyuluh KB

Majalengka, Januari 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana,



KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda,



ASEP SAEPUDIN, S.Kep.Ners.
NIP. 19800923 200801 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. EKA SRI MARYANI, S.Kep.Ns.**
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,

Hj. EKA SRI MARYANI, S.Kep.Ns.
NIP. 19820403 200801 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasopsi Modern	79,97 %
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Total Fertility Rate (TFR)	2,32 Poin

Majalengka, Januari 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana,

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda,



KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006



HJ. EKA SRI MARYANI, S.Kep.Ns.
NIP. 19820403 200801 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. ENOK YUYU YUHENI, S.Kep.Ners.**
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Kedua,

KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006

Pihak Pertama,

HJ. ENOK YUYU YUHENI, S.Kep.Ners.
NIP. 19800619 199903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Koordinator Pos KB Kecamatan, Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa dan Tenaga Penggerak Desa	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta kinerja Pos KB Kecamatan, Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa, TPD, dan PLKB dalam melaksanakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2735 Orang
2.	Meningkatnya Pasangan Usia Subur Mengikuti Program KB	Meningkatnya pemahaman program KKBPK	79,97 %
3.	Meningkatnya sarana dan prasana KIE	Tersedianya sarana KIE Program KKBPK	26 Balai Penyuluh KB

Majalengka, Januari 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana,



KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda,



HJ. ENOK YUYU YUHENI, S.Kep.Ners.
NIP. 19800619 199903 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Drs. H. NASRUDIN, M. M.Pd.**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M. M.Pd.**
Jabatan : **Bupati Majalengka**

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Dr. H. KARNA SOBAHI, M., M.Pd

Majalengka, November 2023



Pihak Pertama

Dr. Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19680204 199903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan	1 Indeks Pembangunan Gender	86,60
2.	Terindungi dan Terpenuhi Hak Anak	2 Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Pratama (500,60)
3.	Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran	3 Total FertilityRate	2,17

Program		Anggaran	Ket
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 280.923.700,00	APBD DAU
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 721.112.300,00	APBD (DAU, BANKEU)
3	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 50.000.000,00	APBD DAU
4	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 75.000.000,00	APBD DAU
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 75.000.000,00	APBD DAU
6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp. 8.717.000.000,00	APBD DAK
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.149.658.920,00	APBD DAU
8	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 542.400.000,00	APBD DAK
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 12.636.115.000,00	APBD DAK
JUMLAH		Rp. 25.247.209.920,00	



Dr. R. KARNA SOBAHI, M.M. Pd.

Majalengka, November 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Majalengka

Dr. Drs. H. NASRUDIN, M. M.Pd.
Pembiaa Utama Muda
NIP. 19680204 199903 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. EUIS KURNIASARI, S. ST., M. Keb**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **Dr. Drs. H. NASRUDIN, M. M.Pd.**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selaku atasan **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Sekretaris

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Dr. Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680204 199903 1 002



Hj. EUIS KURNIASARI, S. ST., M. Keb
NIP. 19740310 199302 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	B
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Tepat Waktu	Persentase Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100%
		Persentase SPM yang jadi SP2D tepat waktu	100%
		Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	100%
		Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	100%
		Persentase aset yang tercatat	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu	100%
		Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%
		Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
		Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan	100%
		Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	100%
		Persentase pelayanan administrasi Surat Menyurat yang tepat waktu	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.410.000,00	APBD DAU
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.620.319.330,00	APBD DAU
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	APBD DAU
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.745.590,00	APBD DAU
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000,00	APBD DAU
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.184.000,00	APBD DAU
	Jumlah	4.149.658.920,00	

Majalengka, November 2023

Sekretaris

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Dr. Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd
Rempia Utama Muda
NIP. 19680204 199903 1 002



Hi. EUIS KURNIASARI, S. ST., M. Keb
NIP. 19740310 199302 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. DIDIT DINURHIDAYAT
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : HJ. EUIS KURNIASARI, S. ST., M. Keb
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Sekretaris

HJ. EUIS KURNIASARI, S. ST., M. Keb
NIP. 19740310 199302 2 001

Perencana Ahli Muda

Ir. DIDIT DINURHIDAYAT
NIP. 19690617 199603 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

PERENCANA AHLI MUDA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	100%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	APBD DAU
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000,00	APBD DAU
3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	6.000.000,00	APBD DAU
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.300.000,00	APBD DAU
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.000.000,00	APBD DAU
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.610.000,00	APBD DAU
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.500.000,00	APBD DAU
Jumlah		68.410.000,00	


Sekretaris



HJ. EUIS KURNIASARI, S. ST., M. Keb
NIP. 19740310 199302 2 001

Majalengka, November 2023

Perencana Ahli Muda



Ir. DIDIT DINURHIDAYAT
NIP. 19690617 199603 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENGKUS KUSWATI, S.Kep., Ners.**
Jabatan : **Perencana Ahli Muda**
Pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **Hj. EUIS KURNIASARI, S. ST., M. Keb**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selaku atasan **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Hj. EUIS KURNIASARI, S. ST., M. Keb
NIP. 19740310 199302 2 001

ENGKUS KUSWATI, S. Kep., Ners
NIP. 19800517 200604 2 024

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawalan, Umum dan Kehumasan	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawalan Tepat Waktu	100%
		Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%
		Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
		Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan	100%
		Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	100%
		Persentase pelayanan administrasi Surat Menyurat yang tepat waktu	100%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.870.590,00	APBD DAU
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.875.000,00	APBD DAU
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	APBD DAU
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	APBD DAU
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	APBD DAU
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	120.000.000,00	APBD DAU
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.184.000,00	APBD DAU
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	APBD DAU
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	APBD DAU
Jumlah		460.929.590,00	

Majalengka, November 2023

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Hi. EUIS KURNIASARI, S. ST., M. Keb
NIP. 19740310 199302 2 001

ENGKUS KUSWATI, S. Kep., Ners
NIP. 19800517 200604 2 024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **UCU SUWARNI, S. IP.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **Hj. EUIS KURNIASARI, S. ST., M. Keb**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Keuangan

Hj. EUIS KURNIASARI, S. ST., M. Keb
NIP. 19740310 199302 2 001

UCU SUWARNI, S. IP
NIP. 19691028 199303 2 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Tepat Waktu	Persentase Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100%
		Persentase SPM yang jadi SP2D tepat waktu	100%
		Persentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	100%
		Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	100%
		Persentase aset yang tercatat	100%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.620.319.330,00	APBD DAU
JUMLAH		3.620.319.330,00	

Majalengka, November 2023

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Keuangan



Hj. EUIS KURNIASARI, S. ST., M. Keb
NIP. 19740310 199302 2 001



UCU SUWARNI, S. IP
NIP. 19691028 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. YUYUN YUHANA**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **Dr. Drs. H. NASRUDIN, M. M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

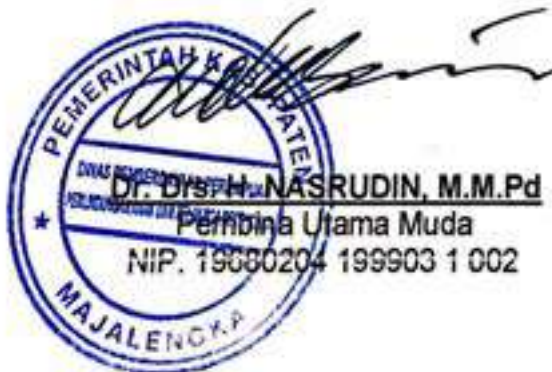
PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak




Dra. YUYUN YUHANA
NIP. 19670207 199203 2 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penanggulangan kekerasan	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan Perempuan	0,01%
	Meningkatnya kualitas Pencegahan Kekerasan terhadap anak dan Perempuan	Persentase potensi kekerasan yang terdeteksi dini	5 %
	Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap anak dan Perempuan	Persentase pengaduan yang tertangani	100 %

Program / Kegiatan		Anggaran	Ket
1	Program Perlindungan Khusus Anak		
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 75.000.000,00	APBD DAU
2	Program Perlindungan Perempuan		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000,00	APBD DAU
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 25.000.000,00	APBD DAU
3	Program Pemenuhan Hak Anak		
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000,00	APBD DAU
JUMLAH		Rp. 200.000.000,00	APBD DAU

Majalengka, November 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak



Dra. YUYUN YUHANA
NIP. 19670207 199203 2 010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENI IRIANI, S. Sos.**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **Dra. YUYUN YUHANA**
Jabatan : **Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selaku atasan **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak

Dra. YUYUN YUHANA
NIP. 19670207 199203 2 010

Analisis Kebijakan Ahli Muda

HENI IRIANI, S. Sos.
NIP. 19660615 198503 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya peran perangkat daerah dalam penerapan Kluster Hak Anak	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pemenuhan kluster hak anak	30 %

Sub Kegiatan			Anggaran	Ket
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Anak Kabupaten/Kota	Pelembagaan Kewenangan	Rp. 50.000.000,00	APBD DAU
JUMLAH			Rp. 50.000.000,00	APBD DAU

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak



Dra. YUYUN YUHANA
NIP. 19670207 199203 2 010

Analis Kebijakan Ahli Muda



HENI IRIANI, S. Sos.
NIP. 19660615 198503 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TETI KURNIAWATI, S. Sos.**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **Dra. YUYUN YUHANA**
Jabatan : **Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selaku atasan **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak

Dra. YUYUN YUHANA
NIP. 19670207 199203 2 010

Analisis Kebijakan Ahli Muda

TETI KURNIAWATI, S. Sos.
NIP. 19791123 200604 2 017

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Pencegahan Kekerasan terhadap anak dan Perempuan	Persentase potensi kekerasan yang terdeteksi dini	5 %
	Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap anak dan Perempuan	Persentase pengaduan yang tertangani	100 %

	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 75.000.000,00	APBD DAU
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000,00	APBD DAU
3	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Rp. 25.000.000,00	APBD DAU
JUMLAH		Rp. 150.000.000,00	APBD DAU

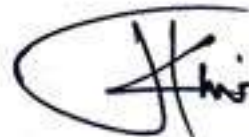
Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak



Dra. YUYUN YUHANA
NIP. 19670207 199203 2 010

Analisis Kebijakan Ahli Muda



TETI KURNIAWATI, S. Sos.
NIP. 19791123 200604 2 017



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRIYANI KHOFIFI, SE., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **Dr. Drs. H. NASRUDIN, M. M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Dr. Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680204 199903 1 002

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan



SRIYANI KHOFIFI, SE., M.M
NIP. 19830806 200604 2 018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

EPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

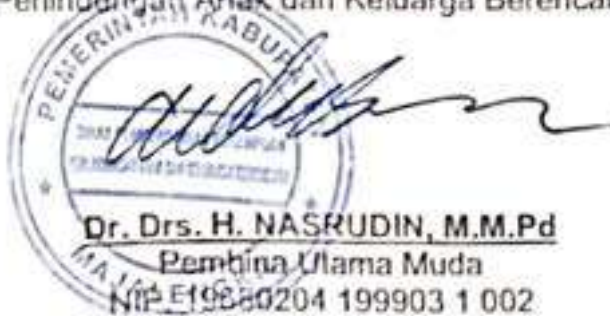
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya SDM dan Anggaran	Persentase SDM terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut hasil pembinaan	20 %
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan PUG	Persentase Peningkatan SDM yang terbina PUG	20 %
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	65,04
	Meningkatnya peran Perempuan kepala keluarga dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Persentase peningkatan Perempuan kepala keluarga yang produktif	10 %

Program/Kegiatan		Anggaran	Ket
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 280.923.700,00	APBD DAU
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 721.112.300,00	APBD (DAU, BANKEU)
JUMLAH		Rp. 1.002.036.000,00	

Majalengka, November 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan


Dr. Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19880204 199903 1 002


SRIYANI KHOFIFI, SE., M.M
NIP. 19830806 200604 2 018



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IVA MONASA, SE., M.Si.**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **SRIYANI KHOFIFI, SE., MM**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selaku atasan **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Analisis Kebijakan Ahli Muda

SRIYANI KHOFIFI, SE., M.M
NIP. 19830806 200604 2 018

IVA MONASA, SE., M.Si
NIP. 19711024 199603 2 004

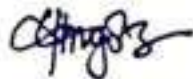
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya peran Perempuan kepala keluarga dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Persentase peningkatan Perempuan kepala keluarga yang produktif	10 %

Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 721.112.300,00	APBD (DAU, BANKEU)
JUMLAH		Rp. 721.112.300,00	

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan



SRIYANI KHOFIFI, SE., M.M
NIP. 19830806 200604 2 018

Majalengka, November 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda



IVA MONASA, SE., M.Si
NIP. 19711024 199603 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELIN HERLINA, S.ST.**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **SRIYANI KHOFIFI, SE., MM**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Analisis Kebijakan Ahli Muda

SRIYANI KHOFIFI, SE., M.M
NIP. 19830806 200604 2 018

ELIN HERLINA, S. ST.
NIP. 19760624 200801 2 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

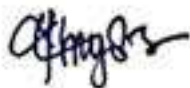
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan PUG	Persentase Peningkatan SDM yang terbina PUG	20 %

Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 280.923.700,00	APBD DAU
JUMLAH		Rp. 280.923.700,00	

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Analisis Kebijakan Ahli Muda



SRIYANI KHOFIFI, SE., M.M
NIP. 19830806 200604 2 018



ELIN HERLINA, S. ST.
NIP. 19760624 200801 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I**
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **Dr. Drs. H. NASRUDIN, M. M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana


Dr. Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660204 199903 1 002

Kepala Bidang Keluarga Berencana


KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penerapan Grand Design Kependudukan	Persentase Grand Design Kependudukan yang diterapkan	100 %
	Meningkatnya Kualitas Grand Design kependudukan yang diterapkan	Persentase Grand Design Kependudukan yang sesuai standar	100 %
	Meningkatnya pemenuhan data pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemenuhan data pengendalian penduduk dan keluarga berencana	100 %
2	Meningkatnya Kesertaan KB Metode Kontrasepsi Modern	Persentase Pemakalan Kontrasepsi Modern (mCPR)	79,98
	Meningkatnya kesadaran Masyarakat untuk menggunakan alokon	Persentase peningkatan Masyarakat yang terbina menggunakan alokon	50 %
	Meningkatnya kualitas tenaga penyuluh Keluarga berencana	Persentase peningkatan tenaga penyuluh KB yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	80 %
	Terkendalinya distribusi alat dan obat kontrasepsi	Persentase kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terpenuhi	100 %
	Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pelaksanaan pelayanan KB	Persentase Stakeholder yang aktif dalam pelaksanaan Pelayanan KB	65 %

Program / Kegiatan		Anggaran	Ket
1	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 542.400.000,00	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp. -	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 542.400.000,00	APBD DAK
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 11.085.615.000,00	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Rp. 840.300.000,00	APBD DAK
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp. 1.162.000.000,00	APBD DAK
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Rp. 4.834750.000,00	APBD DAU, DAK
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp. 4.248.565.000,00	APBD DAK
JUMLAH		Rp. 11.628.015.000,00	

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana


Dr. Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680204 199903 1 002

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana



KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. ENOK YUYU YUHENI, S.Kep., Ners.**
Jabatan : **Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
Pada Bidang Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I**
Jabatan : **Kepala Bidang Keluarga Berencana
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selaku atasan **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana

KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Ahli Muda

Hj. ENOK YUYU YUHENI, S. Kep., Ners
NIP. 19800619 199903 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

**PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
AHLI MUDA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesadaran Masyarakat untuk menggunakan alokon	Persentase peningkatan Masyarakat yang terbina menggunakan alokon	50 %

Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
1	Penguatan peranserta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Rp. 4.582.750.000,00	APBD DAU
2	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Rp. 150.000.000,00	APBD DAK
3	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Rp. 476.000.000,00	APBD DAK
4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp. 686.000.000,00	APBD DAK
JUMLAH		Rp. 5.894.750.000,00	

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Ahli Muda



KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006



HJ. ENOK YUYU YUHENI, S. Kep., Ners
NIP. 19800619 199903 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. EKA SRI MARYANI, S.Kep. NS.**
Jabatan : **Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
Pada Bidang Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I**
Jabatan : **Kepala Bidang Keluarga Berencana
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka**

Selaku atasan **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana

KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Ahli Muda

Hj. EKA SRI MARYANI, S. Kep., NS
NIP. 19820403 200801 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

**PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
AHLI MUDA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Grand Design kependudukan yang diterapkan	Persentase Grand Design Kependudukan yang sesuai standar	50 %

	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Rp. 64.200.000,00	APBD DAK
2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Rp. 322.200.000,00	APBD DAK
3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp. 156.000.000,00	APBD DAK
4	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Rp. 690.300.000,00	APBD DAK
5	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor	Rp. 9.000.000,00	APBD DAK
6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Rp. 243.000.000,00	APBD DAK
	JUMLAH	Rp. 1.484.700.000,00	

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana



KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Ahli Muda



HI. EKA SRI MARYANI, S. Kep., NS
NIP. 19820403 200801 2 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ASEP SAEPUDIN, S. Kep.,**
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
Pada Bidang Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I**
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Ahli Muda

KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I
NIP. 19820306 200801 1 006

H. ASEP SAEPUDIN, S. Kep.,
NIP. 19800923 200801 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

**PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
AHLI MUDA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terkendalinya distribusi alat dan obat kontrasepsi	Persentase kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terpenuhi	100 %

Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp. 85.500.000,00	APBD DAK
2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp. 2.496.139.000,00	APBD DAK
3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp. 1.622.826.000,00	APBD DAK
4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp. 44.100.000,00	APBD DAK
JUMLAH		Rp. 4.248.565.000,00	

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Ahli Muda



KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I
NIP. 19830306 200801 1 006



H. ASEP SAEPUDIN, S. Kep.,
NIP. 19800923 200801 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUARIAH, S. ST.**
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **Dr. Drs. H. NASRUDIN, M. M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga



Dr. Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600204 199903 1 002

JUARIAH, S. ST
NIP. 19750204 200701 2 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

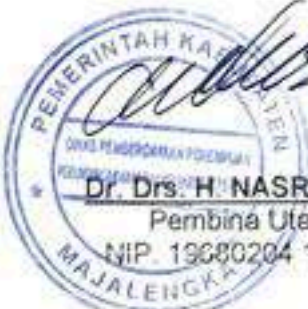
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya Pernikahan Dini	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan	20,3
	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	Persentase Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diterapkan	50 %

Program / Kegiatan		Anggaran	Ket
1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	RP 6.717.000.000,00	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 6.717.000.000,00	APBD DAK
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.550.500.000,00	
	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Rp 538.000.000,00	APBD DAK
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Rp 1.012.500.000,00	APBD DAU, DAK
JUMLAH		Rp. 8.267.500.000,00	

Majalengka, November 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga



[Handwritten Signature]
Dr. Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680204 199903 1 002



JUARIAH, S., ST
NIP. 19750204 200701 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. DIDIH NURHIDAH**
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
Pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **JUARIAH, S. ST.**
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Ahli Muda

JUARIAH, S. ST
NIP. 19750204 200701 2 008

Dra. DIDIH NURHIDAH
NIP. 19660426 199312 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGA**

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya Pernikahan Dini	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan	20,3
	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	Persentase Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diterapkan	50 %

Sub Kegiatan		Anggaran		Ket
1	Advokasi program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rp.	120.000.000,00	APBD DAK
2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Rp.	338.000.000,00	APBD DAK
3	Pengendalian Program KKBPK	Rp.	80.000.000,00	APBD DAK
4	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Rp.	1.012.500.000,00	APBD DAK
5	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp.	360.000.000,00	APBD DAK
6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp.	6.357.000.000,00	APBD DAK
JUMLAH		Rp.	8.267.500.000,00	

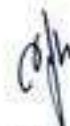
Majalengka, November 2023

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Ahli Muda



JUARIAH, S., ST
NIP. 19750204 200701 2 008



Dra. DIDIH NURHIDAH
NIP. 19660426 199312 2 002